

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI TELEVISI

(Studi Pada Warga RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser)

DHEA MONIKA KHAIR¹

Abstrak

Pendapat Masyarakat Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Di Televisi (Studi Pada Warga RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser) dibimbing oleh Ibu Inda Fitriyarini, S.Sos., M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Hairul Saleh, S.Sos., M.A selaku pembimbing kedua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendapat masyarakat tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi. Analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, dalam penelitian ini dianalisa mengenai opini masyarakat tentang kasus korupsi setelah menonton tayangan berita di televisi yang saat ini sedang marak diberitakan. Penelitian difokuskan pada proses perkara tindak pidana korupsi yaitu, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan. Dari hasil penelitian yang ada, diperoleh bahwa mayoritas masyarakat berpendapat negatif namun tidak sedikit pula yang berpendapat positif, masyarakat juga cenderung memberikan saran mengenai proses perkara tindak pidana korupsi yang masih belum maksimal. Seluruh data yang diperoleh merupakan hasil dari observasi, menganalisa, dan wawancara yang dilakukan di RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Kata Kunci : Pendapat Masyarakat, Pemberitaan Kasus Korupsi Di Televisi

Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia maka pemberitaan mengenai kasus korupsi di media terutama media televisi semakin meningkat. Televisi sebagai media yang mempunyai banyak kelebihan dalam penyampaian pesan-pesannya dibanding dengan media lainnya, karena pesan-pesan yang disampaikan melalui gambar dan suara (sinkron) dan hidup, sangat cepat (aktual) dan dapat menjangkau ruang luas. Semua informasi akan lebih cepat didapat dari media televisi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dheamonika@rocketmail.com

Menurut Lembaga Survei Indonesia mencatat jumlah pemberitaan tentang kasus korupsi mencapai 152.346 dari total 1.872.234 berita sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2013. Ini artinya pemberitaan kasus korupsi menempati porsi sebesar 8,14 persen dari seluruh pemberitaan di Indonesia di luar infotainment. Bahkan frekuensi pemberitaan kasus korupsi cukup tinggi dibanding tema lain seperti kemiskinan. Berita korupsi tertinggi terjadi pada Oktober 2013 terkait penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebanyak 20.393 berita. Disusul berita petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq dan penetapan tersangka terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada Februari 2013. Isu berita korupsi yang menonjol, yakni tentang kasus Hambalang sebesar 14 persen, sapi impor sebesar 10 persen, suap Ketua Mahkamah Konstitusi sebesar 9 persen, serta kasus Bank Century dan Simulator Polri sebesar 6 persen.

Dari pemberitaan kasus korupsi tersebut, masyarakat dapat membentuk suatu pendapat atau pendapat mengenai pemberitaan tersebut di media televisi. Pendapat dalam hal ini adalah suatu penalaran atau pengetahuan mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Pendapat timbul sebagai hasil dari pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti pendapat masyarakat tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi. Pemilihan sampel pada warga RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sendiri bukan tanpa alasan, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di lingkungan tersebut, bahwa sebagian warga sering melihat/menonton tayangan mengenai pemberitaan tentang kasus korupsi yang sedang gencar diberitakan di televisi dan pendapat sebagian dari mereka ada yang positif namun ada pula yang negatif. Selain itu, dikarenakan hampir 80% masyarakat di lingkungan ini berprofesi sebagai pegawai dalam instansi pemerintahan/Pegawai Negeri Sipil yang menurut survei *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menempati urutan teratas tersangka korupsi. Hal inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai opini masyarakat tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi pada warga di RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana pendapat masyarakat tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi pada warga di RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Pendapat Masyarakat

Pendapat setiap individu terhadap sesuatu pastilah berbeda-beda sesuai dengan dimana tempat tinggalnya, bagaimana lingkungannya, apa pekerjaannya serta banyak faktor lainnya. Berikut definisi pendapat menurut para ahli :

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendapat merupakan pikiran atau anggapan tentang suatu hal atau peristiwa yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

Pendapat lain diajukan Effendy, mengatakan bahwa Opini adalah respon yang diberikan seseorang yaitu komunikasi kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan.

Pada dasarnya, pendapat individu yang terbentuk merupakan bentuk pernyataan seseorang atau individu tentang seseorang atau individu tentang sesuatu hal atau permasalahan yang diberikan seseorang yaitu komunikasi kepada komunikator yang sebelumnya telah diberikan rangsangan berupa pertanyaan.

Komunikasi Massa

Menurut Liliweri (Fajar, 2009:221) komunikasi massa itu memiliki unsur-unsur seperti: sumber, bidang pengalaman, pesan, saluran, gangguan, hambatan, efek, konteks maupun umpan balik. Jadi, teknologi pembagi atau media dengan massa yang disebut dengan saluran itu digunakan untuk mengirimkan pesan yang melintasi jarak jauh, misalnya buku, pamflet, majalah, surat kabar, televisi, radio bahkan saat ini ditambah lagi dengan computer serta aplikasinya dengan jaringan telepon serta satelit.

Menurut McQuail (McQuail, 2011) komunikasi massa terutama dipengaruhi oleh kemampuan media massa untuk membuat produksi massa dan untuk menjangkau massa dalam jumlah besar.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa merupakan komunikasi yang dalam proses penyampaian pesannya menggunakan media massa dan bertujuan untuk menjangkau khalayak dalam jumlah besar.

Korupsi

Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” ada lah berkenaan dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary* (dalam Surachmin, 2003:11) korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Menurut Andi Hamzah (1996:123) dalam perkara pidana korupsi terdapat beberapa tahap untuk memproses perbuatan pidana :

1. **Penyelidikan**
Yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.
2. **Penyidikan**
Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memperjelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. **Penangkapan**
Adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
4. **Penahanan**
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati disatu pihak dan kepentingan ketertiban umum dilain pihak yang harus diperhatikan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Pemberitaan Kasus Korupsi

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir telah terungkap satu-persatu pelaku korupsi yang hampir semua berasal dari lini pejabat publik, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Seketika korupsi menjadi *trending topic* di media negara ini. Sebutlah mega proyek Hambalang yang mengantarkan Ketua Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng sebagai tersangka, kemudian disusul oleh Angelina Sondakh sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Demokrat yang menjadi tersangka kasus wisma atlet di Palembang serta pada kasus yang membuat masyarakat kembali melepaskan rasa percaya pada para penegak hukum adalah pada saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar ditangkap terkait penerimaan suap dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Banten.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap di penghujung tahun 2013 ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Jika kasus korupsi sebelumnya banyak melibatkan politisi, pengusaha, pejabat negara, pemimpin partai, menteri dan artis, kini dengan konteks pilkada. Lingkaran korupsi dalam pilkada ini berpusat pada kekuatan politik dinasti keluarga di provinsi Banten. Penangkapan Akil Mochtar dan Ratu Atut Chosiyah adalah bentuk pengembangan dari kasus penangkapan adik Atut, yaitu Tubagus Chaery Wardana dalam upayanya

menyuap ketua MK Akil Mochtar. Melalui pengungkapan suap Ketua MK ini oleh Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, terbualah fakta-fakta penting terkait bagaimana praktik kotor korupsi sudah menguasai Mahkamah Konstitusi. Akil sebagai pimpinan MK, disinyalir menerima uang kotor dari pihak yang bersengketa atau berperkara di pilkada. Ini diluar akal sehat dan pukulan telak bagi dunia hukum Indonesia, bahwa hukum bisa dengan mudahnya dibeli dengan uang.

Selain itu juga pemberitaan kasus korupsi yang sedang marak diberitakan akhir-akhir ini yaitu dimana banyak terpidana koruptor dihukum dengan hukuman penjara yang cukup lama, seperti majelis hakim pengadilan DKI Jakarta memperberat hukuman Djoko Susilo dengan 18 tahun penjara, jauh lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama yaitu 10 tahun. Djoko Susilo dinyatakan terbukti melakukan korupsi serta harus mengembalikan kerugian negara sebesar 32 Milyar dan tidak lupa pencabutan hak politik terpidana. Selain hukuman penjara, sita harta, Djoko Susilo dihukum dihilangkan hak dipilih dan memilihnya sebagai pejabat publik. Kemudian, vonis hukuman penjara terpidana Angelina Sondakh yang diperberat menjadi 12 tahun dimana sebelumnya Angie divonis bersalah memainkan anggaran dan dihukum hanya 4 tahun.

Televisi

Media massa saat ini masih diyakini memiliki kekuatan besar dalam pembentukan opini masyarakat. Dengan media massa, seseorang atau kelompok tertentu menanamkan pesan tertentu melalui informasi-informasi yang penyajiannya seringkali disetting terlebih dahulu. Media televisi merupakan salah satu media yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam proses pembentukan opini atau sudut pandangnya.

George Gerbner dan Larry Gross (dalam Ollie, 2007:109) mengatakan bahwa televisi merupakan alat yang mapan dan berfungsi menyampaikan dan mempertahankan, bukan mengubah, mengancam atau melemahkan keyakinan. Menurut R.Mar'at (dalam Effendy, 2003:192), acara televisi umumnya mempengaruhi sikap, pandangan, persepsi dan perasaan para penonton. Televisi mempunyai daya tarik yang kuat dan tak perlu diragukan lagi. Selain memiliki unsur *audio* (suara) dan *visual* (gambar), gambar ini bukan gambar mati melainkan gambar hidup yang mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada penonton.

Media massa melalui berita yang ditampilkan atau diekspos keluar tersebut merupakan cara efektif sebagai pembentuk opini publik atau masyarakat umum. Sudah dapat dipastikan bahwa setiap topik berita yang dipublikasikan oleh berbagai media massa itu mengandung pembentukan opini, dan kelebihan media TV swasta komersial tersebut mempunyai efek keserempakan (*simultaneity effect*) yang luar biasa dalam penyebaran publikasinya, sehingga mampu menciptakan opini masyarakat yang prosesnya relatif singkat, dan menjangkau jumlah

khalayaknya lebih besar dan tersebar di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan (Ruslan, 1998:74).

Pengaruh televisi terhadap opini masyarakat dinilai semakin kuat, karena isi pesan dalam tayangan televisi lebih berpengaruh dibanding media lain. Tayangan televisi akan menjadi berpengaruh jika pernyataan-pernyataan yang disiarkan stasiun-stasiun televisi dinilai masyarakat populer dan berpengaruh.

Teori S-O-R

Pada awalnya model teori ini dikenal sebagai model Stimulus-Responden (SR) akan tetapi kemudian DeFleur menambahkan Organisme dalam bagiannya sehingga menjadi Stimulus-Organism-Response (S-O-R).

Teori S-O-R ini semula berasal dari psikologi dan kemudian menjadi teori komunikasi, tidak mengherankan karena objek material dari psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama, yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen yang terdiri dari sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi. Adapun teori S-O-R ini juga merupakan model penelitian yang beranjak dari anggapan bahwa organisme akan menghasilkan perilaku atau reaksi tertentu jika diberikan suatu kondisi stimulus tersebut, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dengan reaksi komunikan. Adapun elemen-elemen utama dari model teori S-O-R ini adalah Stimulus yaitu rangsangan atau dorongan berupa pesan, Organism yaitu manusia atau penerima, Response yaitu reaksi, efek, pengaruh atau tanggapan.

Respon yang ditimbulkan stimulus hanya sampai kepada tahap kognitif saja tidak sampai pada tahap afektif dan behavioral dikarenakan tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi tersebut hanya dibatasi pada opini masyarakat saja. Adapun tahap kognitif yaitu ingatan terhadap pesan, kesadaran/pengenalan terhadap pesan dan pengetahuan terhadap pesan tersebut.

Teori Spiral keheningan

Spiral of silence theory yang dikenal dengan teori spiral kesunyian dan sering juga disebut teori spiral kebisuan. Teori ini ditemukan oleh Elizabeth Noelle-Neuman pada tahun 1970. Teori spiral keheningan menyatakan bahwa orang yang yakin bahwa mereka mempunyai sudut pandang yang minoritas tentang isu politik akan tetap dibatasi, sedangkan mereka yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang mayoritas akan lebih terdorong untuk membuka suara.

Spiral keheningan dibangun dengan empat unsur pokok, yaitu :

1. Media massa.
2. Komunikasi antar pribadi dan jalinan interaksi sosial.
3. Pernyataan individu tentang suatu hal.
4. Persepsi orang lain/kecenderungan pendapat tentang suatu persoalan yang dilontarkan.

Definisi Konsepsional

Secara garis besar konsep opini masyarakat adalah tanggapan atau respon dari suatu efek komunikasi yang merupakan jawaban individu yang terbentuk dari salah satu faktor pembentuk opini yaitu *cognitive* (penalaran). Dalam hal ini merupakan pernyataan hasil dari suatu permasalahan mengenai maraknya pemberitaan tentang kasus korupsi di televisi yang meliputi tahap-tahap proses perkara pidana korupsi yaitu, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta penahanan pelaku tindak pidana korupsi yang marak diberitakan di televisi.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Penyelidikan**
Dalam hal ini bagaimana penalaran masyarakat mengenai penyelidikan yaitu penentuan suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana atau tidak pada suatu kasus korupsi yang diberitakan di televisi.
2. **Penyidikan**
Dalam hal ini bagaimana penalaran masyarakat mengenai penyidikan untuk mencari serta menemukan bukti guna menemukan tersangka korupsi dalam pemberitaan di televisi.
3. **Penangkapan**
Dalam hal ini bagaimana penalaran masyarakat tentang pemberitaan di televisi mengenai penangkapan tersangka atau terdakwa sesuai hukum yang berlaku.
4. **Penahanan**
Dalam hal ini bagaimana penalaran masyarakat tentang pemberitaan di televisi mengenai hukuman penahanan para koruptor sesuai hukum yang berlaku.

Lokasi Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka pengumpulan data lapangan penelitian ini dilakukan di RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.

Jenis dan Sumber Data

Penunjukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni cara memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Pemilihan kelompok atau wilayah tertentu

dilakukan setelah peneliti melakukan pengamatan atau penjajakan di lokasi penelitian (Hamidi, 2007:139).

Kriteria informan tersebut antara lain:

1. Warga yang benar-benar mengikuti perkembangan pemberitaan kasus korupsi di televisi,
2. Laki-laki,
3. Usia 40-50 tahun,
4. Berprofesi sebagai Pegawai Pemerintah/PNS

Maka diperoleh 14 informan sebagai sampel berdasarkan kriteria tersebut.

Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan melakukan wawancara yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti.
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Library Research, yaitu penelitian kepustakaan, dimana di dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi ini.
2. Field Work Research, yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan cara:
 - a. Observasi
Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang valid tentang opini masyarakat tentang citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di RT.05 Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dimaksudkan sebagai upaya memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai (informan). Peneliti menggunakan in depth interview (wawancara mendalam), yang mana menurut Kriyantono (2007:98) adalah suatu cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.
 - c. Dokumentasi
Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa dokumen atau arsip.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif, berdasarkan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang terdiri dari :

1. Pengumpulan data
Data pertama yaitu data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan riset kepustakaan mengenai Opini masyarakat tentang pemberitaan kasus korupsi di televisi.
2. Reduksi data atau penyederhanaan data
Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah proses yang sekali jadi, tetapi sebuah proses yang berulang selama proses penelitian kualitatif berlangsung.
3. Penyajian data
Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data yang dimaknai sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
4. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temua baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang sangat kaya, kaya akan sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya. Namun dalam hal ini, sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia sangatlah tidak berkualitas. Korupsi merupakan suatu tindakan yang belakangan ini sering dilakukan oleh sumber daya manusia yang kita miliki. Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak. Bahkan akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di televisi yang memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang pelakunya kebanyakan berasal dari pegawai negeri/pemerintahan yang seharusnya mengabdikan untuk kemajuan bangsa.

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir telah terungkap satu-persatu pelaku korupsi yang hampir semua berasal dari lini pejabat publik, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Seketika korupsi menjadi *trending topic* di media negara ini. Sebutlah mega proyek Hambalang yang mengantarkan Ketua Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng

sebagai tersangka, kemudian disusul oleh Angelina Sondakh sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Demokrat yang menjadi tersangka kasus wisma atlet di Palembang serta pada kasus yang membuat masyarakat kembali melepaskan rasa percaya pada para penegak hukum adalah pada saat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar ditangkap terkait penerimaan suap dalam kasus Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak Banten.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap di penghujung tahun 2013 ini berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Jika kasus korupsi sebelumnya banyak melibatkan politisi, pengusaha, pejabat negara, pemimpin partai, menteri dan artis, kini dengan konteks pilkada. Lingkaran korupsi dalam pilkada ini berpusat pada kekuatan politik dinasti keluarga di provinsi Banten. Penangkapan Akil Mochtar dan Ratu Atut Chosiyah adalah bentuk pengembangan dari kasus penangkapan adik Atut, yaitu Tubagus Chaery Wardana dalam upayanya menyuap ketua MK Akil Mochtar. Melalui pengungkapan suap Ketua MK ini oleh Tubagus Chaery Wardana alias Wawan, terbualah fakta-fakta penting terkait bagaimana praktik kotor korupsi sudah menguasai Mahkamah Konstitusi. Akil sebagai pimpinan MK, disinyalir menerima uang kotor dari pihak yang bersengketa atau berperkara di pilkada. Ini diluar akal sehat dan pukulan telak bagi dunia hukum Indonesia, bahwa hukum bisa dengan mudahnya dibeli dengan uang.

Dari pemberitaan korupsi yang marak dalam berbagai media terutama media televisi, tampak adanya aspek penegakan hukum terhadap perilaku korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menimpa pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diberitakan telah disidangkan atau pelakunya telah dihukum dan dipenjarakan. Namun, dalam pemberitaan tersebut persepsi yang seringkali muncul adalah maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi negara ini maupun tentang kegagalan dalam membangun negara ini, bukan aspek positifnya yaitu proses penegakan hukum terhadap tindak kejahatan korupsi.

Dari lembaga survei Indonesia Indicator (I2) diperoleh bahwa jumlah pemberitaan tentang kasus korupsi mencapai 152.346 berita sejak 1 Januari – 9 Desember 2013, yang berarti bahwa pemberitaan kasus korupsi menempati porsi sebesar 8,14 persen dari seluruh pemberitaan yang ada di Indonesia di luar infotainment. Menurut I2 porsi pemberitaan kasus korupsi pada tahun 2013 sebanyak 12.656 berita per bulan meningkat disbanding tahun 2012 yang mencapai sekitar 8.995 pemberitaan per bulan.

Dari informasi tersebut dapat terlihat bagaimana maraknya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang menjadi konsumsi masyarakat setiap harinya. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah para pelaku korupsi yang kebanyakan berasal dari pegawai pemerintahan baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif dimana seharusnya lembaga ini yang mengemban amanah dari seluruh rakyat Indonesia

untuk menjadikan bangsa ini lebih baik, sejahtera dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelidikan, sebagian masyarakat atau sekitar 50% masyarakat berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang yang ditayangkan dalam pemberitaan di televisi sudah cukup baik, sedangkan 50% masyarakat yang lainnya berpendapat bahwa penyelidikan yang dilakukan belum cukup baik dan masih banyak yang harus diperbaiki.
2. Proses penyidikan, sekitar 70% masyarakat berpendapat bahwa penyidikan kasus korupsi yang telah dilakukan sudah cukup baik dan semakin baik, sedangkan 30% masyarakat berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan belum cukup baik dan maksimal.
3. Proses penangkapan, sekitar 60% masyarakat berpendapat bahwa dalam hal ini penangkapan pelaku tindak pidana korupsi sudah cukup baik pengerjaannya, sedangkan 40% masyarakat lainnya berpendapat belum sepenuhnya baik karena masih terdapat banyak diskriminasi status sosial dan toleransi di dalamnya.
4. Proses penahanan, sekitar 85% persen masyarakat mayoritas masyarakat berpendapat bahwa hukuman penahanan yang diberikan kepada pelaku korupsi sangat tidak sesuai dengan dampak kerugian terhadap keuangan negara yang jumlahnya sangat besar, sedangkan 15% masyarakat lainnya berpendapat sudah cukup sesuai namun hanya perlu sedikit diperbaiki.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah melihat dari penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran pertama ditujukan kepada masyarakat sebagai objek penelitian diharapkan dapat mengambil manfaat dari tayangan pemberitaan mengenai kasus korupsi yang semakin marak terjadi di sekitar kita, agar tidak melakukan tindak kriminal yang sangat merugikan negara dan masyarakat itu sendiri yaitu korupsi.
2. Saran kedua ditujukan kepada pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pemberantasan korupsi agar lebih serius dalam hal penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang terjadi dengan cara tidak memihak kaum tertentu dan tidak memberikan celah untuk keringanan bagi mereka yang terbukti bersalah serta tidak adanya tebang pilih terhadap kasus-kasus korupsi.

Daftar Pustaka

- Ardianto, Elvinaro. 2011, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Simbiosis Rekatama Media.
- Arifin, Anwar. 2010, *Opini Publik*, Depok : Gramata Publishing.
- Bahari, Adib. 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A Sampai Z*, Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Djaja, Ermansjah. 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamidi. 2007, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, Malang : UMM Press.
- Hamzah, Andi. 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Saptas Artha Jaya.
- Hartanti, Evi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moleong, L. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia.
- Olii, Helena. 2007, *Opini Publik*, Jakarta : PT. Indeks.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009, *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ruslan, Rosady. 1998, *Manajemen Humas dan Komunikasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 1990, *Sosiologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemirat, dan Ardianto. 2004, *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sumber Internet :

Pemberitaan kasus korupsi di televisi

id.berita.yahoo.com/survei-152-346-berita-korupsi-selama-januari-desember-141325253.html

Proses perkara tindak pidana

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5330f5c311966/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981

www.wirantaprawira.de/law/criminal/kuhap/index.html#babIII